



## Penerapan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat Daya

Yusrina Dewi<sup>1</sup>, Dewi Sartika<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received : 17 Juli 2022  
Revised : 31 Juli 2022  
Accepted : 31 Juli 2022

### KEYWORDS

Accounting System, Regional Finance

### CORRESPONDENCE

E-mail: [yusrina99dewi@gmail.com](mailto:yusrina99dewi@gmail.com)

### A B S T R A C T

*The reason for this research is to find out the application of the Financial Information System at the Office of Investment and One Stop Service, Manpower and Transmigration (DPMPTSP) Aceh Barat Daya Regency. The type of research used in this research is descriptive qualitative research which is carried out to describe the research subject based on events that occur or what they are. Data was collected through observation and interviews as well as data collection in accounting reporting information management procedures. As well as agency data in the form of agency descriptions. The results of the study conclude that the Office of Investment and One Stop Integrated Services, Manpower and Transmigration of Southwest Aceh Regency in general has established an accounting reporting system in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Accrual Accounting Standards.*

### PENDAHULUAN

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya akuntabilitas. Untuk itu, dalam rangka pertanggung jawaban, setiap pejabat publik yang mengajukan laporan keuangan wajib memberikan pertanggung jawaban atas laporan keuangan harus menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem internal yang sesuai dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan sistem pelaporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian sistem pelaporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. (Ardiansyah, 2017)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu entitas akuntansi dibawah pemerintah, Kabupaten Aceh Barat Daya yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem pelaporan keuangan di DPMPTSP telah dilaksanakan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman baik secara teoritis maupun praktis terkait penerapan sistem pelaporan keuangan di DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya. Bagi DPMPTSP yang diteliti dapat memberikan sumbangan pikiran. Bagi pembaca, dapat menambah informasi, referensi dan pertimbangan yang bermanfaat, serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kerangka Teoritis**

#### ***Sistem Akuntansi***

Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Sistem diartikan sebagai kumpulan komponen yang saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Sistem disebut sebagai subsistem ketika dipandang hubungannya dengan sistem yang lebih besar dimana sistem tersebut hanya menjadi bagian dari sistem yang lebih besar (Pratiwi, 2020).

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan.

#### ***Sistem Akuntansi Pemerintah***

Akuntansi pemerintah merupakan suatu bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan yang mendasari munculnya standar pelaporan keuangan pemerintah bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPRK, masyarakat, dan BPK.. Instansi pemerintah dalam menjalankan administrasinya memerlukan jasa akuntansi, baik analitis maupun peningkatan kualitas, pengawasan, pendidikan dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan. Ini disebut akuntan publik.

Tujuan akuntan publik adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat, benar dan tepat waktu yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, dalam kaitannya dengan operasi entitas pemerintah.. Pengendalian akuntansi pemerintah diselenggarakan agar aparaturnya pemeriksa dapat lebih mudah mengontrol pengelolaan keuangan negara. Secara umum, tujuan akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran dalam pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Adapun pemerintah memiliki tujuan secara umum untuk mensejahterakan rakyat berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintah memiliki tujuan, akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan.

#### ***Penyusunan Laporan Keuangan***

Laporan keuangan yang dikelola oleh DPMPTSP mencakup seluruh aspek keuangan. Laporan keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sistem akuntansi SKPK terdiri dari SIMDA Keuangan Berbasis Akrua dan SIMDA Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Sistem akuntansi SKPK dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas

Sedangkan SIMDA Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan asset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta manajerial lainnya.

### ***Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)***

Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas keuangan Negara, yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan daerah menuju pemerintahan yang lebih baik dan bersih (Santosa, 2018).

### ***Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan***

1. Penganggaran
  - a. rencana kerja anggaran (RKA)
  - b. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan
  - c. Surat penyediaan Dana (SPD)
2. Penatausahaan
  - a. Surat permintaan pembayaran (SPP)
  - b. Surat perintah membayar (SPM)
  - c. Surat perintah pencairan dana (SP2D)
  - d. Surat tanda setoran (STS)
  - e. Register dan
  - f. Surat pengendalian lainnya
3. Akuntansi dan Pelaporan
  - a. Jurnal
  - b. Buku besar
  - c. Buku pembantu
  - d. Laporan realisasi anggaran
  - e. Laporan arus kas
  - f. Neraca

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun pengertian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain (Pratiwi, 2020).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi data catatan atas laporan keuangan Tahun 2021, dan wawancara secara langsung sub bagian keuangan.

### **Teknik Analisis Data**

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teknis analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh

secara menyeluruh dan detail, metode selanjutnya yaitu mereduksi data yang sudah terkumpul sehingga ditemukan data-data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Berdasarkan data laporan keuangan yang nantinya diperoleh akan dievaluasi (Pratiwi, 2020).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Penyusunan Lapoaran Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengacu pada pada peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penerapan pelaporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Berikut tabel Laporan Keungan DPMPTSP Tahun 2021

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		-	-	0,00	-
Pendapatan Restribusi Daerah					
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		14.645.400	14.645.400	100,00	-
Pendapatan Hibah					
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>14.645.400</b>	<b>14.645.400</b>	<b>100,00</b>	-
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	B.3	2.974.563.331	2.547.664.996	85,65	2.996.959.805
Belanja Barang dan Jasa	B.4	1.203.878.497	1.733.746	87,03	8.058.950.423
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>4.178.441.828</b>	<b>3.595.398.742</b>	<b>86,05</b>	<b>11.055.910.228</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>B.5</b>				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.6	29.692.190	29.692.190	100,00	54.510.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	B.7	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>29.692.190</b>	<b>29.692.190</b>	<b>100,00</b>	<b>64.223.000</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>4.208.134.018</b>	<b>3.625.090.932</b>	<b>86,14</b>	<b>11.120.143.228</b>

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Lapora Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Berikut table Neraca DPMPSTSP Kabupaten Aceh Barat Daya

**NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang		-	-
Piutang Lain-lain		-	-
Penyelisihan Piutang		-	-
Beban Dibayar Dimuka		-	-
Persediaan	C.2	7.525.376	32.281.740
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>7.525.376</b>	<b>32.281.740</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.3	735.250.000	735.250.000
Peralatan dan Mesin	C.4	3.644.571.735	3.600.234.145
Gudang dan Bnagunan	C.5	471.100.000	1.193.800.000
Jalan, Jaringan dan Irigasi	C.6	7.609.766.505	7.609.766.505
Asset Tetap Lainnya	C.7	1.649.500	1.649.500
Kontruksi dalam Pengerjaan	C.8	98.010.000	98.010.000
Akumulasi Penyusutan	C.9	(4.740.634.493)	(4.736.593.701)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>7.819.713.247</b>	<b>8.502.170.449</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan		-	-
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Jangka Panjang		-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
Asset Tidak Berwujud		-	-
Asset Lain-lain		-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	C.10	<b>233.122.000</b>	<b>233.122.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>233.122.000</b>	<b>233.122.000</b>
		<b>8.060.360.623</b>	<b>8.767.574.189</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK )		-	-
Utang Bunga		-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
Utang Belanja		-	-
	C.11	<b>5.408.686</b>	<b>5.431.244</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Kepada Pemerintah Pusat			
Utang Kepada Lemabga Keuangan Bank (LKB)			
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Utang Kepada Masyarakat			
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>5.408.686</b>	<b>5.431.244</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>			
<b>EKUITAS</b>	<b>C.12</b>		
EKUITAS		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		-	-
		-	-
		<b>5.408.686</b>	<b>5.431.244</b>
		8.054.951.937	8.762.142.945
		<b>8.060.360.623</b>	<b>8.767.574.189</b>

Konsekuensi dari penggunaan sistem akrual pada penyusunan neraca mengakibatkan setiap entitas pelaporan harus mengungkap setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Penyusunan neraca yang ada pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Barat Daya sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Berikut tabel Laporan Operasional DPMPSTSP Kabupaten Aceh Barat Daya

**LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>			
Pendapatan Restribusi Daerah	D.1	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH</b>			
Pendapatan Hibah	D.2	14.645.400	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>14.645.400</b>	-

<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.3	2.547.664.996	2.996.959.805
Beban Persediaan	D.4	315.988.034	163.248.965
Beban Jasa	D.5	538.759.318	7.124.661.547
Beban Pemeliharaan	D.6	18.150.000	37.390.000
Beban Perjalanan Dinas	D.7	199.570.200	123.143.476
Beban Hibah		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	265.471.292	313.800.891
Beban Penyisihan Piutang		-	-
Beban Lain-lain		-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-	-
Beban Bagi Hasil		-	-
Beban Bantuan Keuangan		-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>3.885.603.840</b>	<b>10.759.204.684</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(3.870.958.440)</b>	<b>(10.759.204.684)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		-	-
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(3.870.958.440)</b>	<b>(10.759.204.684)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Tak Terduga		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(3.870.958.440)</b>	<b>(10.759.204.684)</b>

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Laporan Operasional sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Dengan menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Berikut tabel Laporan Perubahan Ekuitas

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	8.762.142.945	8.397.545.163
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.870.958.440)	(10.759.204.684)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHANMENDASAR LAIN-LAIN		(461.323.500)	3.659.238
Koreksi Ekuitas	E.3	3.6624.090.932	11.120.143.228
KEWAJIBAN UNTUK DISKONSOLIDASIKAN			
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.4</b>	<b>8.054.951.937</b>	<b>8.762.142.945</b>

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

### **Pembahasan**

Dalam pembahasan Penerapan Sistem Pelaporan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, peneliti telah melakukan penelitian langsung di kantor DPMPTSP dan melakukan wawancara dimana ada dua responden yaitu bapak Rahmad Sumedi, SE selaku kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya dan bapak T. Deni Friady, SE selaku Kasubbag, Keuangan, Program dan DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan hasil wawancara, DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya telah menerapkan Sistem Akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, dimana dalam penerapan ini sangat membantu staf dalam menyelesaikan tugasnya. DPMPTSP menggunakan aplikasi yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan SIPD (Sistem Informasi Keuangan Daerah).

Pemahaman staf mengenai SAP berbasis akrual pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya hampir semuanya memahami dikarenakan staf pada DPMPTSP hampir semua memiliki latar belakang pendidikan dari jurusan akuntansi. Adapun jika kurang memahami maka akan diberikan pelatihan sehingga semua staf bisa memahami SAP berbasis akrual. Sistem pencatatan pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya mulai dari transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada DPMPTSP telah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Keberhasilan dari penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentu didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten yang menjadi faktor penting dalam menjalankan SAP berbasis akrual. Untuk itu pemerintah pusat daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintah. Untuk menerapkan basis akrual, diperlukan pemahaman khusus mengingat SAP ini tergolong baru dipemerintahan.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sistem penyusunan laporan keuangan pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya telah menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD yang lebih memudahkan bagian keuangan dan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, masih adanya pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya yang kurang kompeten / kurang memahami sistem akuntansi berbasis akrual karena latar belakang pendidikannya yang bukan dari Akuntansi.

DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya secara umum telah menerapkan system akuntansi sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua dan Permendageri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

### **Keterbatasan**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan beberapa informasi dan data-data dari pihak instansi tidak mudah, dikarenakan banyak data-data yang bersifat rahasia sehingga tidak sembarang orang bisa mengakses data tersebut.



## **Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh, maka diharapkan untuk melakukan Penerapan Sistem Pelaporan Keuangan pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya agar dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga pencatatan yang dilakukan sesuai dengan tanggal dan didukung oleh dokumen, serta dapat memberi pelatihan kepada staf yang belum memahami tentang akuntansi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari dukungan serta dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih terutama kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kepada pihak-pihak lainnya yang telah memberi semangat dari awal penelitian sampai tahap penyusunan.

## **REFERENSI**

- 2021, D. N. (2021). *Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu*. 7(2), 107–115.
- Ardiansyah. (2017). *PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO.71 TAHUN 2010 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH (DISPENDA) KOTA MAKASSAR*. 71.
- Pratiwi, D. M. (2020). *ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN ENREKANG*.
- Santosa, K. M. S. (2018). *SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN KULON PROGO*.